Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 9(2), 2026. 367-379
DOI: https://doi.org/10.57178/atestasi.v9i2.2601

OPEN ACCESS

ISSN Online: 2621-1505
ISSN Print : 2621-1963

Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi
https://jurnal.feb-umi.id/index.php/ATESTASI
This Work is Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Pengaruh Transparansi Anggaran dan Temuan Audit BPK terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit sebagai Variabel Moderasi

(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2024)

Aneka Muffti [1*] *Fefri Indra Arza* [2]

[1*] *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Indonesia*
[2] *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Indonesia*

[*]Corresponding author.
anekamuffti@gmail.com ; *fefriarza@gmail.com*

Keywords:
Budget Transparency; BPK Audit Findings; Audit Opinion; Follow-up of Audit Recommendations; Ordinal Logistic Regression; Local Government Financial Statements.

Conflict of Interest Statement:
The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2026 Atestasi. All rights reserved.

Abstract

Purpose: This study aims to examine the effect of budget transparency and BPK audit findings on local government financial statement (LKPD) audit opinions, with audit recommendation follow-up (TLRHP) as a moderating variable.

Research Design and Methodology: Employing a quantitative causal design, this study analyzes 76 observations from 19 regencies/cities in West Sumatra Province over the 2021–2024 period using secondary data from official BPK reports and PPID portals. Data were tested via Ordinal Logistic Regression with Moderated Regression Analysis (MRA).

Findings and Discussion: Results demonstrate that budget transparency negatively and significantly affects BPK audit opinions (B = -31.940; p = 0.021), indicating that increased public disclosure facilitates auditor scrutiny (form over substance). Conversely, BPK audit findings (B = 0.166; p = 0.341) and recommendation follow-up (B = 0.506; p = 0.939) exhibit no significant direct effect. Furthermore, TLRHP moderates and strengthens the impact of budget transparency on audit opinions (B = 83.895; p = 0.019), but fails to moderate the impact of audit findings (p = 0.494).

Implications: Local governments must prioritize substantive financial reporting quality rather than mere procedural publication. Future research should evaluate qualitative transparency metrics across expanded geographic samples.

Pendahuluan

Tuntutan reformasi akuntabilitas sektor publik di Indonesia mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyajikan pertanggungjawaban keuangan yang transparan, akuntabel, dan andal (Furqan et al., 2020) et al., 2020). Secara nasional, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mencatat peningkatan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada entitas Pemerintah Daerah (Widha Adinata et al., 2023) Namun demikian, pencapaian opini WTP secara agregat belum sepenuhnya menjamin ketiadaan permasalahan struktural dalam tata kelola keuangan publik (Widha Adinata et al., 2023). Di Provinsi Sumatera Barat, meskipun mayoritas dari 19 kabupaten/kota konsisten meraih predikat WTP, data

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mencatat bahwa frekuensi temuan audit terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan regulasi masih fluktuatif (BPK RI Sumbar, 2024). Fenomena ini menandakan adanya "paradoks akuntabilitas" di tingkat daerah, di mana tingginya predikat WTP belum berbanding lurus dengan kebersihan administrasi dari temuan audit (Furqan et al., 2020). Kerentanan tata kelola tersebut terlihat nyata pada kasus Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sempat mengalami penurunan predikat menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun anggaran 2021 akibat kelemahan material SPI dan tumpukan rekomendasi audit yang belum ditindaklanjuti secara proaktif (BPK RI Sumbar, 2024).

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perolehan opini audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penelitian tersebut menemukan bahwa transparansi anggaran berpengaruh positif terhadap opini WTP dan temuan audit berpengaruh negatif, karena keterbukaan publikasi dianggap mereduksi asimetri informasi. Sebaliknya, pada penelitian terdahulu lainnya mendapati bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan dan temuan audit BPK tidak selalu merusak opini audit selama nilainya berada di bawah ambang batas materialitas (materiality threshold). Di sisi lain, studi (Furqan et al., 2020) dan (Aulia Dwi Lestari & Abdul Rohman, 2022) menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai sejauh mana akumulasi temuan pengawasan internal memicu penurunan predikat opini. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya empirical gap mengenai faktor-faktor yang memengaruhi opini audit LKPD.

Teori Keagenan (Agency Theory) yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976), Teori Kelembagaan (Institutional Theory) oleh DiMaggio dan Powell (1983), serta Teori Stewardship oleh (James H. Davis, 1997) digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan teoritis untuk memahami dinamika tata kelola keuangan daerah. Agency Theory menempatkan transparansi anggaran dan pengawasan BPK sebagai mekanisme pengendalian formal (control mechanism) untuk menekan asimetri informasi antara pemerintah daerah (agent) dan masyarakat/DPRD (principal). Institutional Theory memberikan sudut pandang bahwa desakan transparansi dan penyelesaian temuan audit merupakan bentuk tekanan isomorfisme koersif dan normatif agar Pemda memperoleh legitimasi publik. Sementara itu, Stewardship Theory memandang Pemda sebagai steward yang berintegritas untuk secara proaktif menindaklanjuti rekomendasi audit demi meningkatkan kualitas pelaporan keuangan publik.

Dalam penelitian ini, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) ditempatkan sebagai variabel moderasi, bukan sebatas variabel independen langsung sebagaimana pada mayoritas literatur terdahulu. Penempatan TLRHP sebagai variabel pemoderasi ditujukan untuk menguji apakah komitmen perbaikan Pemda mampu memitigasi dampak negatif temuan audit BPK serta memperkuat pengaruh transparansi anggaran terhadap perolehan opini audit. Hal ini sekaligus mengisi theoretical/model gap dalam literatur akuntansi sektor publik yang masih terbatas menguji fungsi interaksi perbaikan audit dalam kerangka tata kelola pemerintah daerah.

Di samping itu, penelitian mengenai interaksi transparansi anggaran, temuan audit BPK, dan tindak lanjut rekomendasi audit pada 19 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2021–2024 masih sangat terbatas, sehingga terdapat contextual gap yang perlu dikaji lebih lanjut. Kebaruan (novelty) penelitian ini juga terletak pada pengujian transparansi anggaran berbasis checklist 12 dokumen keuangan daerah wajib pada portal PPID sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1796/SJ Tahun 2012 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, serta pengujian data panel terbaru (76 unit observasi) menggunakan pendekatan Regresi Logistik Ordinal (Moderated Regression Analysis). Berdasarkan alur pemikiran tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi anggaran dan temuan audit BPK terhadap opini audit LKPD, serta menguji peran tindak lanjut rekomendasi audit sebagai variabel moderasi pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2021–2024.

Ulasan Literatur

Landasan Teori (Agency Theory, Institutional Theory, dan Stewardship Theory)

Penelitian ini mengintegrasikan tiga landasan teori utama dalam menjelaskan hubungan antarvariabel tata kelola sektor publik, yaitu Agency Theory, Institutional Theory, dan Stewardship Theory. Agency Theory yang dikembangkan oleh Jensen et al. (1976) menjelaskan hubungan kontraktual antara principal (masyarakat dan DPRD) dengan agent (pemerintah daerah) yang diwarnai oleh potensi asimetri informasi (information asymmetry). Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik memiliki informasi yang lebih mendalam mengenai kondisi riil operasional dan keuangan daerah. Dalam konteks ini, transparansi anggaran dan pengawasan eksternal oleh BPK bertindak sebagai mekanisme pengendalian formal (control mechanism) untuk menekan tindakan oportunis agen dan memastikan pertanggungjawaban publik. Institutional Theory yang dipelopori oleh DiMaggio & Powell (2010) memberikan sudut pandang bahwa organisasi pemerintah daerah tidak hanya bergerak atas dasar efisiensi internal, tetapi juga terdorong oleh tekanan lingkungan eksternal demi memperoleh legitimasi sosial (institutional isomorphism). Tekanan koersif (coercive isomorphism) timbul dari regulasi formal dan standar perundang-undangan seperti kewajiban mematuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Sementara itu, tekanan normatif (normative isomorphism) mendorong Pemda mengadopsi prinsip keterbukaan publikasi anggaran.

Melengkapi kedua perspektif tersebut, Stewardship Theory yang dirumuskan oleh James H. Davis (1997) memandang aparatur pemerintah sebagai steward berintegritas yang berorientasi pada kepentingan publik dan pelayanan. Steward yang berkomitmen tidak hanya menyusun laporan keuangan secara akurat karena takut akan sanksi, melainkan secara proaktif menindaklanjuti seluruh rekomendasi perbaikan BPK guna menjaga keandalan pelaporan dan kepercayaan masyarakat (Firmansyah et al., 2022; Pramana et al., 2023).

Transparansi Anggaran dan Opini Audit LKPD

Transparansi anggaran merupakan prinsip keterbukaan pemerintah daerah dalam menyajikan informasi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan publik agar dapat diakses oleh masyarakat secara luas dan mudah (Mahmudi, 2015; Mardismo, 2018). Dalam kerangka Agency Theory dan Institutional Theory, keterbukaan publikasi dokumen fiskal di portal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1796/SJ Tahun 2012 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 berfungsi mengurangi asimetri informasi sekaligus memenuhi ekspektasi legitimasi publik. Keterbukaan ini mendorong aparatur daerah untuk menyusun pencatatan secara lebih tertib, disiplin, dan patuh pada regulasi, sehingga memberikan keyakinan memadai bagi auditor BPK dalam menetapkan opini yang optimal (Firmansyah et al., 2022).

H1: Transparansi anggaran berpengaruh positif terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah.

Temuan Audit BPK dan Opini Audit LKPD

Temuan audit BPK menggambarkan akumulasi frekuensi kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD (BPK RI, 2023; (Aulia Dwi Lestari , Abdul Rohman, n.d.). Perspektif Agency Theory dan Institutional Theory menegaskan bahwa tingginya jumlah temuan audit merefleksikan adanya disfungsi sistem pengendalian internal serta kegagalan agen dalam memenuhi standar institusional yang ditetapkan principal (Furqan et al., 2020 ; Zahwah Aqilah Junaed & Arie Apriadi Nugraha, 2025). Banyaknya temuan pemeriksaan mengindikasikan tingginya risiko salah saji material (material misstatement) yang berpotensi langsung menurunkan tingkat keyakinan auditor dan merusak kewajaran pencapaian opini audit daerah (Sri Ayem & Kirana Feby Kusumasari, 2020); Widha Adinata et al., 2023).

H2: Temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah.

Peran Moderasi Tindak Lanjut Rekomendasi Audit pada Hubungan Transparansi Anggaran dan Opini Audit

Keterbukaan publikasi informasi anggaran (transparency) yang dijalankan pemerintah daerah tidak akan mencapai efektivitas maksimum dalam meyakinkan pihak eksternal apabila tidak diimbangi dengan langkah perbaikan riil atas kelemahan operasional (Jensen et al., 1976; James H. Davis, 1997) et al., 1997). Dalam perspektif Stewardship Theory, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) merupakan wujud komitmen proaktif dan bentuk pertanggungjawaban entitas dalam merespons evaluasi auditor BPK (Furqan et al., 2020; Pramana et al., 2023). Ketika tingkat transparansi anggaran yang tinggi didukung oleh konsistensi penyelesaian rekomendasi audit yang optimal, sinyal akuntabilitas yang dikirimkan kepada publik dan pengawas eksternal menjadi semakin kuat (Sutaryo & Tri Amanu, 2020; Meniq Anjas Wahyuni et al., 2023). Sinergi antara transparansi publik dan perbaikan internal ini memperketat kontrol tata kelola, sehingga diperkirakan mampu memperkuat pengaruh positif transparansi anggaran terhadap perolehan opini WTP (Widha Adinata et al., 2023).

H3: Tindak lanjut rekomendasi audit memperkuat pengaruh positif transparansi anggaran terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah.

Peran Moderasi Tindak Lanjut Rekomendasi Audit pada Hubungan Temuan Audit BPK dan Opini Audit

Dalam kerangka Agency Theory dan Institutional Theory, dampak negatif yang ditimbulkan oleh akumulasi temuan audit BPK dapat ditiadakan atau diredam apabila pemerintah daerah menunjukkan komitmen perbaikan secara konsisten ((Jensen et al., 1976); (DiMaggio & Powell, 2010). Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) berfungsi sebagai mekanisme korektif (corrective mechanism) yang secara sistematis membenahi kelemahan SPI dan mengatasi ketidakpatuhan regulasi (Furqan et al., 2020; Zahwah Aqilah Junaedi & Arie Apriadi Nugraha, 2025). Langkah perbaikan ini memberikan keyakinan memadai kepada auditor eksternal bahwa kelemahan pelaporan pada periode sebelumnya telah ditanggulangi, sehingga risiko salah saji berulang dapat ditekan (Furqan et al., 2020; (Widha Adinata et al., 2023). Dengan demikian, tingginya rasio penyelesaian rekomendasi BPK diprediksi mampu memperlemah atau memitigasi dampak negatif temuan audit terhadap penurunan opini audit LKPD.

H4: Tindak lanjut rekomendasi audit memperlemah pengaruh negatif temuan audit BPK terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah.

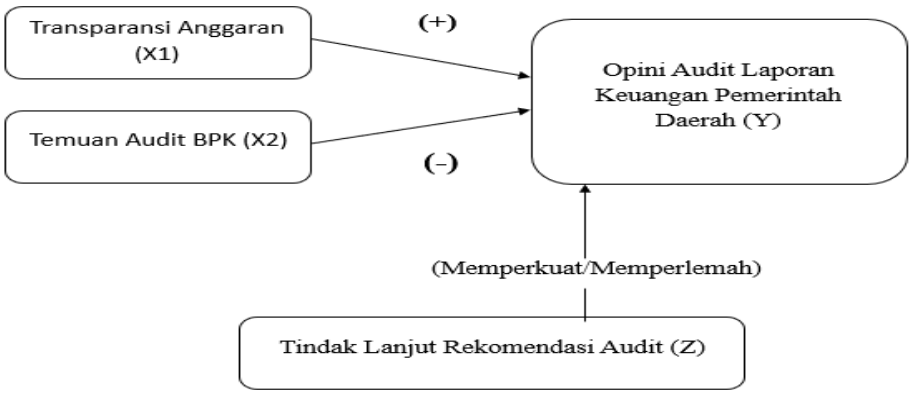

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan bahwa transparansi anggaran (X1) dihipotesiskan berpengaruh positif dan temuan audit BPK (X2) berpengaruh negatif terhadap opini audit LKPD (Y). Sementara itu, tindak lanjut rekomendasi audit (Z) ditempatkan sebagai variabel moderasi yang diprediksi memperkuat pengaruh positif transparansi anggaran (H3) serta memperlemah dampak negatif temuan audit terhadap perolehan opini audit LKPD (H4) pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

Desain dan Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian kausalitas (causal research) untuk menguji dan menganalisis hubungan sebab-akibat antara transparansi anggaran dan temuan audit BPK terhadap opini audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta menguji peran tindak lanjut rekomendasi audit sebagai variabel moderasi. Objek penelitian berfokus pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dengan rentang waktu pengamatan selama empat tahun anggaran, yaitu periode 2021 hingga 2024.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pemerintah daerah tingkat dua di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 12 pemerintah kabupaten dan 7 pemerintah kota (total 19 entitas pemerintah daerah). Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik sampling jenuh (sensus), di mana seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Dengan periode pengamatan selama 4 tahun (2021–2024) pada 19 pemerintah daerah, maka total unit observasi yang dianalisis dalam penelitian ini berjumlah 76 sampel observasi (19 Pemda X 4 Tahun).

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dihimpun melalui metode dokumentasi. Data variabel temuan audit BPK, opini audit LKPD, dan rasio tindak lanjut rekomendasi audit bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang diterbitkan secara resmi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Sementara itu, data transparansi anggaran diperoleh melalui penelusuran arsip ketersediaan dokumen publikasi keuangan daerah pada portal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan situs web resmi masing-masing pemerintah daerah.

Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variable	Indikator	Referensi Utama
Transparansi Anggaran (X1)	Ketersediaan dokumen perencanaan anggaran (RKPD, KUA-PPAS, RKA-SKPD Ketersediaan dokumen penganggaran & perubahan (Raperda APBD, Perda APBD, Ringkasan DPA-SKPD, Raperda Perubahan APBD, Perda Perubahan APBD) Ketersediaan dokumen pertanggungjawaban (LRA Pemda, LKPD Audited, LKjIP/LAKIP, RLPPD) Ketersediaan publikasi dokumen pada portal resmi PPID / situs web Pemda	Inmendagri No. 188.52/1796/SJ (2012); Permendagri No. 77 (2020)
Temuan Audit BPK (X2)	Frekuensi kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Internal Frekuensi kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Total agregat jumlah frekuensi temuan pemeriksaan dalam LHP BPK RI	Lestari & Rohman (2019); Furqan et al. (2020)
Tindak Lanjut Rekomendasi Audit (Z)	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tingkat penyelesaian tunggakan catatan perbaikan auditor BPK Komitmen korektif manajerial pemerintah daerah atas LHP periode sebelumnya	Lestari & Rohman (2022); Adinata et al. (2023)
Opini Audit LKPD (Y)	Kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*) catatan atas laporan keuangan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) Peringkat tingkatan opini BPK (WTP = 5, WTP-DPP = 4, WDP = 3, TW = 2, TMP = 1)	Furqan et al. (2020); Junaedi & Nugraha (2025)

Sumber: Data sekunder diolah dari skripsi, 2026

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi anggaran dan temuan audit BPK terhadap opini audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta menguji peran tindak lanjut rekomendasi audit sebagai variabel moderasi pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Analisis data dilakukan menggunakan metode Regresi Logistik Ordinal (*Moderated Regression Analysis*) dengan Opini Audit LKPD (Y) sebagai variabel dependen, Transparansi Anggaran (X1) dan Temuan Audit BPK (X2) sebagai variabel independen, serta Tindak Lanjut Rekomendasi Audit (Z) sebagai variabel moderasi.

Tabel 2 menunjukkan karakteristik objek penelitian yang terdiri atas 19 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dengan periode pengamatan selama 4 tahun anggaran (2021–2024), sehingga menghasilkan total 76 unit observasi. Berdasarkan jenis pemerintah daerah, sampel penelitian terdiri dari 12 pemerintah kabupaten (63,16%) dan 7 pemerintah kota (36,84%).

Table 2. Karakteristik Objek Penelitian

Variable	Measurement	n	%
Jenis Pemerintah Daerah	Kabupaten	12	63.16
	Kota	7	36.84
Periode Pengamatan (Tahun)			
	2021	19	25.00
	2022	19	25.00
	2023	19	25.00
	2024	19	25.00
Total Observasi	Unit Observasi (19 X 4)	76	100.00

Source: Secondary data processed, 2026

Table 3. Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	*Minimum*	*Maximum*	*Mean*	*Std. Deviation*
Transparansi Anggaran	***76***	***0***	***0,417***	***0,076***	***0,095***
Temuan Audit BPK	***76***	***4***	***45***	***15,16***	***7,367***
Tindak lanjut Rekomendasi Audit	***76***	***0,092***	***0,920***	***0,516***	***0,153***
Opini Audit	***76***	***3***	***5***	***4,86***	***0,39***
Valid N (listwise)	***76***				

Source: SPSS Output Processed, 2026

Tabel 3 menyajikan hasil analisis statistik deskriptif terhadap 76 unit observasi pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2021–2024. Variabel Transparansi Anggaran mencatatkan nilai minimum sebesar 0 dan maksimum sebesar 0,417, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,076 serta standar deviasi sebesar 0,095. Tingginya nilai standar deviasi dibandingkan nilai rata-rata mengindikasikan adanya variasi dan ketimpangan tingkat keterbukaan dokumen publikasi anggaran yang cukup lebar antar-pemerintah daerah.

Variabel Temuan Audit BPK memiliki rentang dari nilai minimum 4 kasus hingga maksimum 45 kasus, dengan nilai rata-rata sebesar 15,16 kasus dan standar deviasi sebesar 7,367, yang menunjukkan sebaran frekuensi kasus kelemahan SPI dan ketidakpatuhan regulasi cenderung mengelompok di sekitar nilai rata-rata. Selanjutnya, variabel Tindak Lanjut Rekomendasi Audit mencatatkan nilai minimum 0,092 dan maksimum 0,920, dengan rata-rata sebesar 0,516 dan standar deviasi sebesar 0,153. Adapun variabel Opini Audit bergerak dari nilai minimum 3 hingga maksimum 5, dengan pencapaian

rata-rata yang tergolong tinggi yaitu 4,86 serta standar deviasi yang relatif kecil sebesar 0,39, yang menandakan bahwa perolehan opini audit oleh pemerintah daerah di Sumatera Barat cenderung konsisten dan berada pada tingkatan yang optimal sepanjang periode pengamatan.

Hasil pengujian asumsi klasik pada Tabel 4 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen, yaitu Transparansi Anggaran, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit, memiliki nilai *Tolerance* di atas 0,10 (masing-masing sebesar 0,997; 0,996; dan 0,997) serta nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) sebesar 1,000 yang berada jauh di bawah ambang batas 10. Dengan demikian, model regresi dinyatakan terbebas dari masalah multikolinearitas dan seluruh variabel terbukti layak digunakan dalam analisis pengujian hipotesis selanjutnya.

Table 4. Hasil Uji Multikolinearitas

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	0,554	0,196		2,822	0,006		
Transparasi Anggaran	-0,318	0,164	-0,198	-1,943	0,056	0,997	1
Temuan Audit	-0,01	0,002	-0,47	-4,608	0	0,996	1
Tindak Lanjut Rekomendasi Audit	0,028	0,04	0,071	0,692	0,491	0,997	1
a Dependent Variable: Opini Audit						>0,05	<10

Source: SPSS Output Processed, 2026

Hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel Transparansi Anggaran, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit masing-masing memiliki nilai Tolerance di atas 0,10 (0,997; 0,996; dan 0,997) serta nilai VIF sebesar 1,000, sehingga model regresi terbebas dari gejala multikolinearitas. Dari pengujian tersebut diperoleh persamaan regresi linier Y = 0,554 - 0,318 X1 - 0,010 X2 + 0,028 X3, dengan nilai konstanta sebesar 0,554.

Secara parsial, Transparansi Anggaran (X1) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Opini Audit (B = -0,318; t = -1,943; p = 0,056). Sebaliknya, Temuan Audit BPK (X2) terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Opini Audit (B = -0,010; t = -4,608; p = 0,000), yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi frekuensi temuan pemeriksaan BPK, semakin rendah predikat opini audit yang diperoleh pemerintah daerah. Sementara itu, Tindak Lanjut Rekomendasi Audit (X3) menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan secara statistik (B = 0,028; t = 0,692; p = 0,491).

Selain uji multikolinearitas, pengujian asumsi paralelisme (*Test of Parallel Lines*) juga dilakukan untuk memastikan kelayakan penggunaan analisis regresi logistik ordinal, mengingat variabel dependen Opini Audit (Y) diukur menggunakan skala ordinal. Suatu model dinyatakan memenuhi asumsi paralelisme apabila nilai signifikansi (*p-value*) pada pengujian *Chi-Square* lebih besar dari 0,05 (Sig > 0,05), yang berarti garis ambang batas antar-kategori bersifat sejajar dan model regresi logistik ordinal layak digunakan (Ghozali, 2021). Hasil pengujian paralelisme disajikan pada Tabel 5 berikut:

Table 5. Uji Paralelisme (Test of Parallel Lines)

Test of Parallel Lines[a]				
Model	-2 Log Likelihood	Chi-Square	df	Sig.
Null Hypothesis	57,380			
General	53,275[b]	4,105[c]	5	0,534
The null hypothesis states that the location parameters (slope coefficients) are the same across response categories.				
a. Link function: Logit.				
b. The log-likelihood value cannot be further increased after maximum number of step-halving.				
c. The Chi-Square statistic is computed based on the log-likelihood value of the last iteration of the general model. Validity of the test is uncertain.				

Source: SPSS Output Processed, 2026

Berdasarkan hasil pengujian *Test of Parallel Lines* dalam model regresi logistik ordinal, diperoleh nilai statistik *Chi-Square* sebesar 4,105 dengan derajat kebebasan (*df*) sebesar 5 dan nilai signifikansi

(*Sig.*) sebesar 0,534. Karena nilai signifikansi tersebut berada di atas taraf nyata 0,05 (0,534 > 0,05), maka asumsi garis paralel (*parallel lines assumption*) terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa koefisien kemiringan (*slope coefficients*) bernilai sama di setiap kategori variabel dependen, sehingga model regresi logistik ordinal dinyatakan valid dan layak digunakan untuk analisis pengujian hipotesis selanjutnya.

Evaluasi kelayakan model secara keseluruhan (*Model Fitting Information*) dilakukan untuk menguji apakah variabel Transparansi Anggaran (X1), Temuan Audit BPK (X2), Tindak Lanjut Rekomendasi Audit (Z), serta variabel interaksinya secara bersama-sama mampu membentuk model regresi logistik ordinal yang fit terhadap data. Model dinyatakan menunjukkan kecocokan yang baik apabila terjadi penurunan nilai -2 *Log Likelihood* antara model *Intercept Only* dan model *Final*. Hasil pengujian kelayakan model *overall* disajikan pada Tabel 6 berikut:

Table 6. Uji Kelayakan Model Overall (Model Fitting Information)

Model Fitting Information				
Model	**-2 Log Likelihood**	**Chi-Square**	**df**	**Sig.**
Intercept Only	65,687			
Final	57,380	8,307	5	0,140
Link function: Logit.				

Source: SPSS Output Processed, 2026

Berdasarkan Tabel *Model Fitting Information*, nilai -2 Log Likelihood mengalami penurunan dari 65,687 pada model Intercept Only menjadi 57,380 pada model Final, yang menghasilkan nilai Chi-Square sebesar 8,307 dengan df sebesar 5 dan signifikansi 0,140 (p > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan model regresi belum berbeda secara signifikan dari model dasar, sehingga pengujian hipotesis parsial tetap berpatokan pada estimasi parameter masing-masing variabel

Pengujian kesesuaian model (*Goodness-of-Fit Test*) dilakukan untuk mengevaluasi seberapa jauh model regresi logistik ordinal yang dibentuk sesuai dengan data hasil observasi pengamatan. Evaluasi ini diukur melalui statistik *Pearson* dan *Deviance*, di mana model dinyatakan memiliki kecocokan yang baik (*fit*) apabila nilai signifikansi (*p-value*) dari kedua pengujian tersebut berada di atas taraf nyata 0,05. Hasil pengujian kesesuaian model disajikan pada tabel berikut:

Table 7. Uji Kesesuaian Model (Goodness-of-Fit Test)

Goodness-of-Fit			
	Chi-Square	**df**	**Sig.**
Pearson	105,967	145	0,994
Deviance	57,380	145	1,000

Source: SPSS Output Processed, 2026

Berdasarkan Tabel *Goodness-of-Fit*, uji kesesuaian model menunjukkan nilai *Chi-Square* pada *Pearson* sebesar 105,967 dengan derajat kebebasan (*df*) sebesar 145 dan nilai signifikansi sebesar 0,994. Sementara itu, nilai *Chi-Square* pada *Deviance* tercatat sebesar 57,380 dengan derajat kebebasan (*df*) sebesar 145 dan nilai signifikansi sebesar 1,000. Karena nilai signifikansi dari kedua uji tersebut berada jauh di atas taraf nyata 0,05 (p > 0,05), maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara model observasi dengan model teoretis. Hal ini membuktikan bahwa model regresi logistik ordinal yang digunakan memiliki kecocokan (*fit*) yang sangat baik terhadap data penelitian.

Pengujian koefisien determinasi (*Pseudo R-Square*) dilakukan untuk mengukur sejauh mana proporsi variabilitas dari variabel dependen Opini Audit LKPD mampu dijelaskan oleh kombinasi variabel-variabel independen di dalam model regresi logistik ordinal. Hasil pengujian koefisien determinasi disajikan pada tabel berikut:

Table 8. Koefisien Determinasi (Pseudo R-Square)

Pseudo R-Square	
Cox and Snell	0,104
Nagelkerke	0,179
McFadden	0,126
Link function: Logit.	

Source: SPSS Output Processed, 2026

Berdasarkan Tabel *Pseudo R-Square*, diperoleh nilai *Cox and Snell* sebesar 0,104, nilai *Nagelkerke* sebesar 0,179, dan nilai *McFadden* sebesar 0,126. Nilai *Nagelkerke* sebesar 0,179 mengindikasikan bahwa sebesar 17,9% variasi perolehan Opini Audit LKPD pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat mampu dijelaskan oleh kombinasi variabel Transparansi Anggaran, Temuan Audit BPK, dan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit di dalam model. Sementara itu, sisanya sebesar 82,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Table 9. Parameter Estimtes

Parameter Estimates								
		Estimate	Std. Error	Wald	df	Sig.	95% Confidence Interval	
							Lower Bound	Upper Bound
Threshold	[Y = 3]	-3,339	3,758	0,789	1	0,374	-10,705	4,027
	[Y = 4]	-0,795	3,660	0,047	1	0,828	-7,969	6,379
Location	X1	-31,940	13,852	5,317	1	0,021	-59,088	-4,791
	X2	0,166	0,175	0,905	1	0,341	-0,176	0,508
	Z	0,506	6,646	0,006	1	0,939	-12,520	13,532
	X1Z	83,895	35,714	5,518	1	0,019	13,897	153,893
	X2Z	-0,255	0,373	0,469	1	0,494	-0,986	0,475
Link function: Logit.								

Source: SPSS Output Processed, 2026

Berdasarkan hasil pengujian *Parameter Estimates*, Transparansi Anggaran (X1) terbukti berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit (Y) (B = -31,940; p = 0,021), sehingga H1 didukung, sedangkan Temuan Audit BPK (X2) (p = 0,341) dan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit (Z) (p = 0,939) secara langsung tidak berpengaruh signifikan sehingga H2 tidak didukung. Selanjutnya, variabel interaksi antara transparansi anggaran dan tindak lanjut (X1Z) terbukti berpengaruh signifikan (B = 83,895; p = 0,019) sehingga H3 didukung, sementara interaksi antara temuan audit dan tindak lanjut (X2Z) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan (p = 0,494) sehingga H4 tidak didukung.

Analisis Regresi Logistik Ordinal

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode Regresi Logistik Ordinal (Ordinal Logistic Regression) untuk memprediksi besarnya peluang (logit/odds) naik atau turunnya tingkatan kategori Opini Audit BPK (Y) yang dipengaruhi oleh Transparansi Anggaran (X1), Temuan Audit BPK (X2), dan peran moderasi Tindak Lanjut Rekomendasi Audit (X3). Metode ini dipilih karena variabel terikat Opini Audit BPK diukur menggunakan skala ordinal berjenjang (TMP, TW, WDP, hingga WTP) dan tidak mensyaratkan asumsi normalitas data.

Berdasarkan hasil pengolahan data, model regresi logistik ordinal yang dibentuk menghasilkan persamaan logit kumulatif sebagai berikut:

$$\mathbf{In}\left(\frac{P(Y\leq j}{1-P(Y\leq j)}\right) = a_j\text{-}\left[-31,940X_1 + 0,166X_2 + 0,506X_3 + 83,895(X_1 \cdot X_3) + -0,255(X_2 \cdot X_3)\right]$$

Berdasarkan kalkulasi matematis terhadap persamaan model regresi logistik ordinal tersebut, disimpulkan bahwa dengan rata-rata tingkat Transparansi Anggaran (0,076), Temuan Audit BPK (15,16 temuan), dan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit (0,516), pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat memiliki peluang atau probabilitas yang sangat tinggi untuk memperoleh predikat

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tingginya angka probabilitas ini mencerminkan tingginya daya ketepatan (*accuracy*) model terhadap realitas empiris di lapangan, di mana pencapaian opini WTP pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat terbukti mendominasi sepanjang periode pengamatan 2021–2024.

Pengujian hipotesis parsial dan moderasi melalui analisis regresi logistik ordinal dilakukan untuk menguji pengaruh langsung variabel independen serta peran variabel moderasi terhadap variabel dependen. Evaluasi ini didasarkan pada nilai koefisien regresi (*Estimate*), statistik uji *Wald*, dan tingkat signifikansi (p-value), di mana suatu hipotesis dinyatakan didukung apabila nilai signifikansi berada di bawah taraf nyata 0,05 (p < 0,05). Hasil pengujian hipotesis lengkap disajikan pada tabel berikut:

Table 10. Uji Hipotesis

Hipotesis	Variabel	Estimate	Sig.	Keputusan
H1	X1 → Y	-31,94	0,021	Didukung
H2	X2 → Y	0,166	0,341	Tidak didukung
H3	X1Z → Y	83,895	0,019	Didukung
H4	X2Z → Y	-0,255	0,494	Tidak didukung

Source: SPSS Output Processed, 2026

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 9 (Uji Hipotesis), variabel Transparansi Anggaran (X1) terbukti berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit LKPD dengan nilai koefisien *Estimate* sebesar -31,94 dan nilai signifikansi 0,021 (p < 0,05), sehingga hipotesis pertama (H1) didukung. Sebaliknya, Temuan Audit (X2) dengan nilai *Estimate* sebesar 0,166 dan signifikansi 0,341 (p > 0,05) tidak berpengaruh signifikan secara langsung, sehingga hipotesis kedua (H2) tidak didukung.

Pada pengujian interaksi moderasi, variabel interaksi antara Transparansi Anggaran dan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit (X1Z) terbukti berpengaruh signifikan dengan nilai koefisien *Estimate* sebesar 83,895 dan signifikansi 0,019 (p < 0,05), sehingga hipotesis ketiga (H3) didukung. Namun, variabel interaksi antara Temuan Audit dan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit (X2Z) dengan nilai *Estimate* sebesar -0,255 dan signifikansi 0,494 (p > 0,05) tidak berpengaruh signifikan, sehingga hipotesis keempat (H4) tidak didukung.

Pembahasan

Pengaruh Transparansi Anggaran terhadap Opini Audit

Hasil analisis menunjukkan bahwa Transparansi Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit LKPD dengan nilai koefisien *Estimate* sebesar -31,940, nilai statistik *Wald* sebesar 5,317, dan nilai signifikansi 0,021 (p < 0,05). Temuan tersebut menunjukkan adanya hubungan statistik antara tingkat keterbukaan informasi keuangan daerah melalui dokumen wajib pada portal PPID dengan perolehan predikat opini audit oleh BPK. Nilai koefisien yang bernilai negatif menunjukkan bahwa semakin lengkap dokumen anggaran yang dipublikasikan secara terbuka, semakin mudah bagi auditor BPK maupun publik untuk meneliti kesesuaian administrasi, sehingga memicu pengetatan kriteria pengujian kewajaran (*form over substance*). Secara konseptual, hal ini sejalan dengan *stewardship theory* di mana pemerintah daerah sebagai pengelola publik dituntut transparan, namun secara praktis keterbukaan dokumen di portal PPID menuntut kedisiplinan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) secara substantif agar tidak menimbulkan temuan administratif yang memengaruhi penilaian auditor.

Pengaruh Temuan Audit terhadap Opini Audit

Hasil analisis menunjukkan bahwa Temuan Audit BPK tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap Opini Audit LKPD dengan nilai koefisien *Estimate* sebesar 0,166, nilai statistik *Wald* sebesar 0,905, dan nilai signifikansi 0,341 (p > 0,05). Secara faktual di lapangan, meskipun sejumlah pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat masih mencatatkan temuan pemeriksaan baik terkait kelemahan

Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan hal tersebut tidak serta-merta mengubah kategori perolehan opini audit. Karakteristik temuan audit di wilayah ini umumnya didominasi oleh permasalahan administratif yang masih berada di bawah ambang batas materialitas (*materiality threshold*), sehingga BPK tetap memberikan predikat kewajaran yang optimal selama tidak berdampak sistematis terhadap pos-pos utama laporan keuangan.

Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Audit terhadap Opini Audit

Hasil analisis menunjukkan bahwa Tindak Lanjut Rekomendasi Audit secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit LKPD dengan nilai koefisien *Estimate* sebesar 0,506, nilai statistik *Wald* sebesar 0,006, dan nilai signifikansi 0,939 ($p > 0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) merupakan bentuk evaluasi dan perbaikan tata kelola paska-pemeriksaan periode sebelumnya. Kecepatan penyelesaian rekomendasi lebih berdampak pada perbaikan sistem administratif jangka panjang daripada secara langsung mengubah kategori status opini audit atas LKPD tahun berjalan.

Analisis Peran Moderasi Tindak Lanjut Rekomendasi Audit

Hasil pengujian variabel interaksi moderasi menggunakan Regresi Logistik Ordinal menunjukkan bahwa interaksi antara Transparansi Anggaran dan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit (X1Z) menghasilkan nilai koefisien *Estimate* sebesar 83,895, statistik *Wald* 5,518, dan signifikansi 0,019 ($p < 0,05$). Karena nilai signifikansi berada di bawah 0,05, terbukti bahwa Tindak Lanjut Rekomendasi Audit memoderasi dan memperkuat pengaruh Transparansi Anggaran terhadap Opini Audit BPK. Ketika keterbukaan informasi fiskal diiringi dengan penyelesaian rekomendasi perbaikan yang konsisten, sinyal akuntabilitas internal meningkat sehingga memperjelas ketepatan pencapaian kategori kewajaran opini audit.

Sebaliknya, interaksi antara Temuan Audit dan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit (X2Z) menghasilkan nilai koefisien -0,255, statistik *Wald* 0,469, dan signifikansi 0,494 ($p > 0,05$), sehingga terbukti bahwa Tindak Lanjut Rekomendasi Audit tidak memoderasi hubungan antara Temuan Audit BPK terhadap Opini Audit. Penetapan kategori opini audit tetap berpatokan secara ketat pada evaluasi substantif atas salah saji material tahun berjalan secara independen tanpa terpengaruh oleh interaksi penyelesaian temuan masa lalu.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Transparansi Anggaran, Temuan Audit BPK, dan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Provinsi Sumatera Barat periode 2021–2024, baik secara langsung maupun melalui model moderasi. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, ditemukan bahwa Transparansi Anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan opini audit, sementara Temuan Audit dan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit secara langsung tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Selain itu, pengujian interaksi menunjukkan bahwa Tindak Lanjut Rekomendasi Audit terbukti memoderasi dan memperkuat hubungan antara transparansi anggaran terhadap predikat Opini Audit LKPD, namun tidak terbukti memoderasi hubungan antara temuan audit terhadap opini audit.

Secara teoretis dan praktis, penelitian ini memberikan kontribusi yang bernilai bagi pengembangan literatur akuntansi sektor publik serta perumusan kebijakan tata kelola keuangan daerah. Dari segi teoretis, penelitian ini memperkaya perspektif stewardship theory dalam menjelaskan hubungan antara transparansi birokrasi dan kualitas laporan keuangan. Dari segi praktis, temuan ini memberikan masukan strategis bagi pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi pengelolaan anggaran secara substantif dan memperkuat efektivitas pengendalian intern guna mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penelitian ini menekankan orisinalitasnya dengan menyoroti bahwa komitmen penyelesaian tindak lanjut

rekomendasi audit terbukti bersinergi secara signifikan dalam memperkuat dampak transparansi anggaran terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan daerah.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan penting yang perlu dicatat. Ruang lingkup penelitian hanya terbatas pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dalam rentang waktu empat tahun (2021–2024), dengan nilai kemampuan penjelas model (Nagelkerke R-Square sebesar 17,9%) yang mengindikasikan masih terdapat faktor-faktor lain di luar model penelitian. Berdasarkan keterbatasan tersebut, agenda penelitian di masa mendatang disarankan untuk memperluas cakupan wilayah sampel ke tingkat nasional, memperpanjang rentang periode pengamatan, serta menambahkan variabel independen lain seperti karakteristik kepala daerah atau indeks efektivitas pengendalian intern guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

Pengakuan

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, fasilitas, serta bantuan yang berarti selama proses penyusunan dan penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada lembaga pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat serta instansi terkait yang telah memberikan akses data sekunder sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Apresiasi serupa juga diberikan kepada pihak institusi akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang yang telah memberikan masukan konstruktif demi peningkatan kualitas substansi artikel ini.

References

Aulia Dwi Lestari, & Abdul Rohman. (2022). Pengaruh temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi audit terhadap kualitas pelayanan publik melalui kualitas laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi Undip*, 11(2), 1–12. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting

DiMaggio, P., & Powell, W. W. (2010). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields (translated by G. Yudin). *Journal of Economic Sociology*, *11*(1), 34–56. https://doi.org/10.17323/1726-3247-2010-1-34-56

Firmansyah, A., Yuniar, M., & Arfiansyah, Z. (2022). Kualitas laporan keuangan di Indonesia: Transparansi informasi keuangan dan karakteristik pemerintah daerah. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*, 4(2), 45–60. www.djpk.kemenkeu.go.id

Furqan, A. C., Wardhani, R., Martani, D., & Setyaningrum, D. (2020). The effect of audit findings and audit recommendation follow-up on the financial report and public service quality in Indonesia. *International Journal of Public Sector Management*, *33*(5), 535–559. https://doi.org/10.1108/IJPSM-06-2019-0173

James H. Davis. (1997). *Toward a stewardship theory of managemen*.

Jensen, M. C., Meckling, W. H., Benston, G., Canes, M., Henderson, D., Leffler, K., Long, J., Smith, C., Thompson, R., Watts, R., & Zimmerman, J. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. In *Journal of Financial Economics* (Number 4). Harvard University Press. http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html

Mahmudi. (2015). Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah. https://elibrary.uinsgd.ac.id/detail/manajemen-keuangan-pemerintah-daerah/22982

Mardismo. (2018). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah https://books.google.co.id/books?id=6_BBEAAAQBAJ&lpg=PP1&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false

Meniq Anjas Wahyuni, Ana Sopanah, & Endah Puspitosarie. (2023). PENGARUH TEMUAN AUDIT DAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN (TLRHP) TERHADP OPINI AUDIT PEMERINTAH DAERAH ATAS LKPD KOTA/KABUPATEN DI SUMATERA UTARA TA 2020. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, *3*. https://doi.org/https://doi.org/10.53625/jirk.v3i6.6966

Adinata, W., Puspandoyo, T., & Ling, M. (2023). Pengaruh opini audit laporan keuangan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah. *Indonesian Treasury Review*, 8(1), 45–58.

Pramana, A. C., Rukmini, M., Riningsih, D., Prihardina, O. W., & So, M. (2023). Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pemeriksaan Sebagai Penunjang Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *JAF- Journal of Accounting and Finance*, *7*(1), 49. https://doi.org/10.25124/jaf.v7i1.5936

Ayem, S., & Kusumasari, K. F. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa dengan akuntabilitas sebagai variabel mediasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 10(2), 145–158. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/25827

Sutaryo, S., & Amanu, K. (2020). Transparansi informasi pemerintah daerah melalui website: Faktor politik atau keuangan? *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(1), 43–60. https://doi.org/10.25105/mraai.v20i1.4619

Zahwah Aqilah Junaed, & Arie Apriadi Nugraha. (2025). Pengaruh Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil The Effect Of Audit Findings And Follow-Up On Recommendations From Audits On The Quality Of Local Government Financial Reports (Study on Regencies and Cities in West Java Province 2019-2023). *Indonesian Accounting Research Journal*, *6*(1), 62–70.